



STRATEGI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI

Oleh : Nazaruddin Margolang, Widyaiswara Ahli Madya BPPP Riau

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi dan upaya yang diperlukan dalam peningkatan kelas kemampuan kelompok. Keberadaan kelompok tani saat ini memiliki kecenderungan statis bahkan menurun kuantitas dan kualitasnya. Kondisi kelompok tani tersebut berkaitan dengan kinerja penyuluh pertanian. Oleh sebab itu strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok dilakukan melalui peningkatan kinerja penyuluhan dan pemberdayaan petani dalam kelompoknya.

Kata Kunci : strategi, kelas kemampuan kelompok, kelompok tani, kinerja penyuluh, pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

Kelompok tani merupakan organisasi kaum tani yang tidak bisa ditinggalkan dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian, bahkan keberhasilan Penyuluhan Pertanian disuatu wilayah selalu dikaitkan dengan keragaan dan keberadaan kelompok tani.

Upaya pembinaan kelompok tani melalui penyuluhan pertanian berkaitan dengan upaya pemberdayaan petani. Entang Sastraatmadja, 2005 dalam Eko Legowo, 2006 mengemukakan bahwa Ke depan Penyuluhan Pertanian adalah bagian integral dari pemberdayaan

(empowering) dan pemertabatan (dignity) kaum tani.

Sementara itu kondisi kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan stasioner bahkan menurun. Secara empiris gambaran dari kelompok tani tersebut sebagai berikut : (1) sebagian kelas kelompoknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, status kelasnya lebih tinggi namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya rendah, dan (2) sebagian kelompok tani sudah “bubar”



namun masih terdaftar. (Hermanto dan Dewa K.S. Swastika, 2011)

Kondisi tersebut dapat terjadi karena kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah. Pembentukan dan Penumbuhan Kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, sehingga dengan berakhirnya proyek kelompok tani tidak berfungsi atau tinggal namanya saja.

Syahyuti, 2012 dalam Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 tahun 2007 mengemukakan bahwa Satu penelitian yang cukup luas cakupannya yang dilakukan di Indonesia, menemukan bahwa petani yang berada dalam organisasi formal sangat sedikit. *“More advanced rural producers’ organizations can be found, though in very limited number”* (Bourgeois *et al.*, 2003). Jika pun ada, kapasitas keorganisasian mereka lemah. Hal ini bahkan telah menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan program secara keseluruhan (PSEKP, 2006). Banyak studi membuktikan

bahwa tidak mudah membangun organisasi petani (Hellin *et al.*, 2007: 5), karena petani cenderung merasa lebih baik tidak berorganisasi (Stockbridge *et al.*, 2003).

Disisi lain Peran kelompok tani selalu dituntut untuk menjadi motor utama dalam memfasilitasi kaum tani dalam melakukan usahatani. Bahkan dalam Permentan 237 tahun 2007 dikemukakan bahwa pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan system agribisnis, peningkatan peranan, dan peran serta petani beserta anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahatani. Pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Tuntutan terhadap Kelompok tani demikian besarnya, ini berarti kelompok tani harus dibina dan



diberdayakan sehingga menjadi kelompok yang solid yang memiliki kemampuan dalam mengakses fasilitas pembangunan pertanian. Sunyoto Usman, 2004 mengemukakan bahwa Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik).

Menjawab permasalahan di atas maka perlu di kaji apa saja kemampuan kelompok tani yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar kelas kelompok dapat meningkat. Setelah ditemukan kemampuan yang harus diperbaiki maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi apa yang perlu dilakukan agar kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh kelompok.

II. PEMAHAMAN TENTANG KELOMPOK TANI

Menurut Permentan Nomor 82 Tahun 2013 ada beberapa istilah yang berhubungan dengan Kelompok Tani yaitu kelembagaan Petani,

Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, pelaku utama dan pelaku usaha.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pelaku utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.



Kontak tani berdasarkan Dirjenbun, 1992 adalah pengurus kelompok tani yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah, dan mantan pengurus yang masih aktif menggerakkan anggota kelompok tani untuk kemajuan usahatani. Sedangkan menurut Permentan 237 tahun 2007 Kontak Tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Bila dilihat dari fungsi kelompok tani, dikemukakan bahwa fungsi Kelompok Tani adalah sebagai berikut :

a. **Kelas belajar** ; Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya

kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

- b. **Wahana kerjasama** ; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
- c. **Unit Produksi** ; Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas

Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani dan meningkatkan



kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya.

III. KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI

Penilaian Kelas Kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memotivasi petani agar lebih berprestasi dalam mencapai kelas kemampuan yang lebih tinggi. Disamping itu dengan penilaian akan diketahui kelemahan-kelemahan kelompok tani yang dinilai sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Pelaksanaan penilaian ini disusun dalam bentuk tim di semua tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian yaitu :

1. Tim Penilaian tingkat Desa
2. Tim Pelaksana tingkat kecamatan
3. Tim pelaksana tingkat kabupaten/kota
4. Tim Pembina tingkat provinsi.
5. Tim pengendali tingkat pusat.

Berdasarkan Permen PAN No. 2 tahun 2008 yang bertugas

mengembangkan kelompok tani Pemula ke Lanjut adalah Penyuluh Pertanian Pelaksana (Iib – Iid), kelompok tani Lanjut ke Madya adalah Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (IIIa – IIIb) dan Kelompok tani Madya ke Utama adalah Penyuluh Pertanian Pertama (IIIa – IIIb).

Penilaian kemampuan kelompok tani dirumuskan dan disusun dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengendalian dan pelaporan
5. Pengembangan kepemimpinan kelompok tani

Kelima hal tersebut disebut dengan Panca Kemampuan Kelompok tani /PAKEM POKTAN dari fungsi-fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 168/Per/Sm.170 /J/11/11 Tanggal 18 Nopember 2011, tentang Petunjuk



Pelaksanaan Penilaian kemampuan Kelompok Tani menjelaskan bahwa kemampuan kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Kemampuan merencanakan, meliputi

kegiatan:

a. Kelas Belajar

- 1) Merencanakan kebutuhan belajar;
- 2) Merencanakan pertemuan/musyawarah.

b. Wahana Kerjasama

- 1) Merencanakan pemanfaatan sumberdaya (pelaksanaan rekomendasi teknologi);
- 2) Merencanakan kegiatan pelestarian lingkungan.

c. Unit Produksi

- 1) Merencanakan definitif kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan rencana kegiatan kelompok lainnya;
- 2) Merencanakan kegiatan usaha (usahatani berdasarkan analisa usaha, peningkatan usaha kelompok, produk sesuai

permintaan pasar, pengolahan dan pemasaran hasil, penyediaan jasa).

2. Kemampuan mengorganisasikan, meliputi kegiatan:

a. Kelas Belajar

- 1) Menumbuhkembangkan kedisiplinan kelompok;
- 2) Menumbuhkembangkan kemauan/motivasi belajar anggota.

b. Wahana Kerjasama

Mengembangkan aturan organisasi kelompok.

c. Unit Produksi

Mengorganisasikan pembagian tugas anggota dan pengurus kelompok tani.

3. Kemampuan melaksanakan, meliputi kegiatan:

a. Kelas belajar

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran secara kondusif;
- 2) Melaksanakan pertemuan dengan tertib.

b. Wahana Kerjasama

- 1) Melaksanakan kerjasama penyediaan jasa pertanian;



- 2) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
 - 3) Melaksanakan pembagian tugas;
 - 4) Menerapkan kedisiplinan kelompok secara taat azas;
 - 5) Melaksanakan dan mentaati kesepakatan anggota;
 - 6) Melaksanakan dan mentaati peraturan/perundangan yang berlaku;
 - 7) Melaksanakan pengadministrasian/pencatatan kegiatan kelompok.
- c. Unit Produksi
- 1) Melaksanakan pemanfaatan sumberdaya secara optimal;
 - 2) Melaksanakan RDK dan RDKK;
 - 3) Melaksanakan kegiatan usahatani bersama;
 - 4) Melaksanakan penerapan teknologi;
 - 5) Melaksanakan pemupukan dan penguatan modal usahatani;
 - 6) Melaksanakan pengembangan fasilitas dan sarana kerja;
 - 7) Melaksanakan dan mempertahankan kesinambungan produktivitas.
4. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, meliputi kegiatan:
 - a. Mengevaluasi kegiatan perencanaan;
 - b. Mengevaluasi kinerja organisasi/kelembagaan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
 5. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok, meliputi kegiatan:
 - a. Kelas Belajar
 - 1) Mengembangkan keterampilan dan keahlian anggota dan pengurus kelompok;
 - 2) Mengembangkan kader-kader pemimpin;
 - 3) Meningkatkan kemampuan anggota untuk melaksanakan hak dan kewajiban.
 - b. Wahana Kerjasama



- 1) Meningkatkan hubungan kerjasama dalam pengembangan organisasi;
- 2) Meningkatkan hubungan kerjasama dalam pengembangan sahatani.

c. Unit Produksi

- 1) Mengembangkan usaha kelompok;
- 2) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra usaha.

Total nilai pembobotan adalah 1.000, dari jumlah bobot tersebut berdasarkan tingkat kemampuan, kelompok dibagi dalam 4 kelas :

- 1). Kelas PEMULA nilai 0 s.d. 250 (Kelas Belajar),
- 2). Kelas LANJUT nilai 251 s.d. 500 (Kelas Usaha),
- 3). Kelas MADYA nilai 501 s.d. 750 (Kelas Bisnis)
- 4).Kelas UTAMA nilai 751 s.d. 1.000 (Kelas Mitra).

Dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian No. 168 tahun 2011 mengemukakan penilaian kemampuan kelompok dirumuskan dan

- disusun dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi : 1) Perencanaan (bobot 200),
- 2) Pengorganisasian (bobot 100),
 - 3) Pelaksanaan (bobot 400).
 - 4) Pengendalian dan Pelaporan (bobot 150),
 - 5) Pengembangan kepemimpinan kelompok tani (bobot 150) .

IV. KINERJA PENYULUH PERTANIAN

Prestasi penyuluhan pernah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, hal ini selalu menjadi kebanggaan bagi kita para penyuluh pertanian. Namun akhir-akhir ini keberhasilan pelaksanaan penyuluhan kurang terdengar, dan sepertinya sangat sulit untuk meraih prestasi, bahkan statemen-statemen yang miring sering ditujukan pada kinerja penyuluh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh IPB menggambarkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja



penyuluhan rendah yaitu : 1) Kompetensi penyuluh, 2) Umur dan masa kerja, 3) aspek internal (dukungan, penghargaan, supervisi dan monitoring), 4) luasnya cakupan wilayah kerja, terbatasnya honor dan rendahnya biaya operasional penyuluh, 5) rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan. Berhubungan dengan hal tersebut maka diperlukan berbagai upaya agar kinerja penyuluh tersebut dapat meningkat diantaranya melalui peningkatan peran organisasi penyelenggara penyuluhan, memperhatikan jenjang karir dan kesejahteraan penyuluh, dan peningkatan peran lembaga pendukung.

Menilik pada system kerja penyuluhan, pada saat pencapaian swasembada system kerja yang digunakan adalah system kerja LAKU (latihan dan kunjungan). Eko Legowo, 2006, mengemukakan bahwa system kerja LAKU dengan pendekatan komoditi pada saat itu sangat cocok, karena masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan produksi pangan, saat ini masalah utama yang dihadapi adalah

pengentasan kemiskinan petani, sehingga pendekatan komoditi sudah tidak cocok lagi. Untuk itu Eko Legowo pada Tahun 1989 mengusulkan system kerja LARI (Latihan dengan Rekayasa Inovasi) untuk menunjang system kerja LAKU. Hal ini dilakukan agar penyuluh selalu memiliki dan mampu menjawab permasalahan teknologi spesifik lokal yang dibutuhkan petani, tanpa tergantung pada hasil pengujian-pengujian local. Hal ini sangat memungkinkan dilaksanakan karena adanya perangkat komputer dan IT yang mampu menampung, mengolah dan menyajikan data dan informasi secara padat, cepat akurat dan interaktif.

V. STRATEGI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI

Peningkatan kelas Kelompok merupakan indikasi bahwa keberfungsian kelompok telah mampu memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Kelas kemampuan kelompok adalah indikator bukan tujuan,



untuk itu strategi peningkatan kelas kelompok haruslah strategi yang mampu mengantarkan petani memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Strategi yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kelas kelompok adalah :

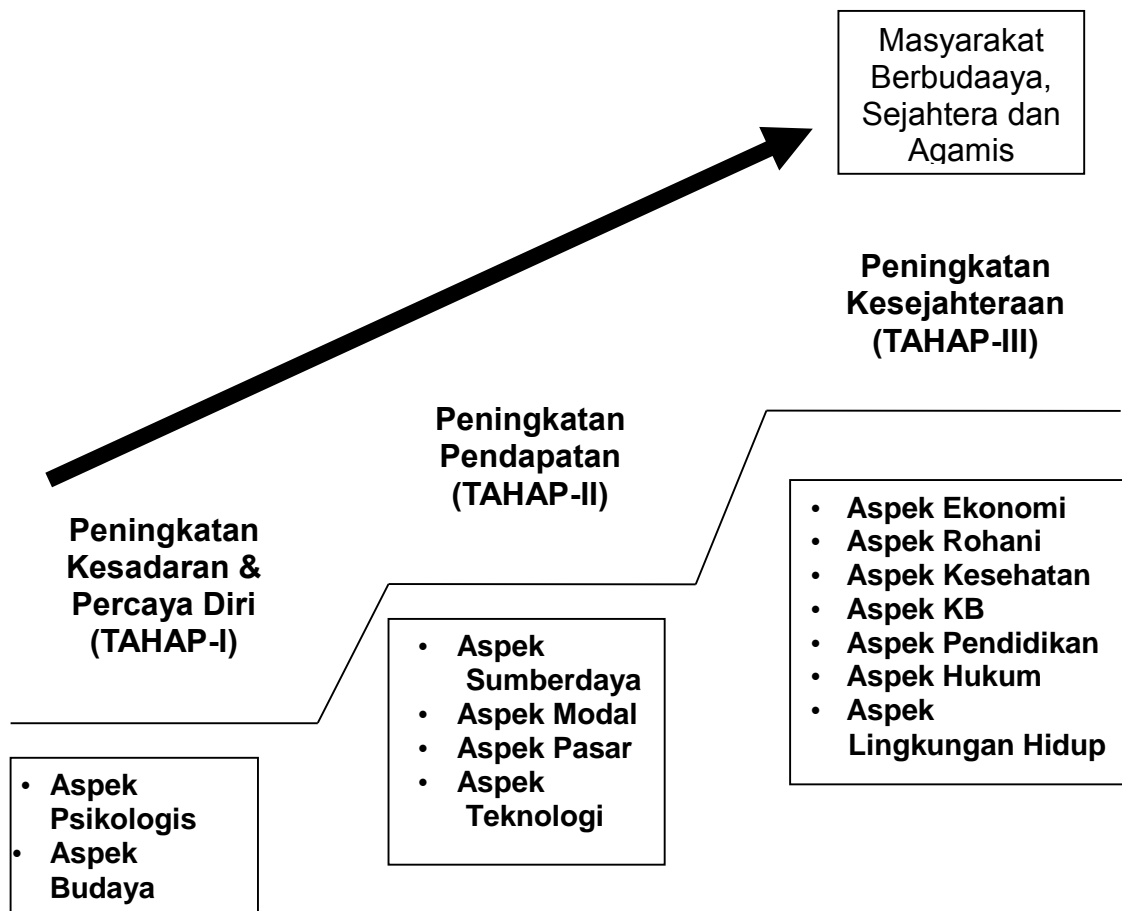
1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Pertanian yang dilakukan melalui :

- 1) Peningkatan Kompetensi Penyuluh melalui pelatihan.
- 2) Perbaikan internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring
- 3) Fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk operasional penyuluhan

2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui progam pemberdayaan yaitu:

- 1) **Pengembangan SDM** : Pengembangan SDM diawali dengan upaya peningkatan kesadaran, hal ini berkaitan

dengan aspek psikologis dan budaya. Petani harus diyakinkan bahwa mereka memiliki kesempatan dan kemungkinan yang tinggi untuk memiliki pendapatan, dan atau meningkatkan pendapatan dengan mempelajari aspek sumberdaya yang dimiliki, aspek permodalan, pasar dan teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya yang menyangkut aspek ekonomi, rohani, kesehatan, pendidikan hukum dan lain-lain. Pengembangan SDM ini akan menghasilkan kelompok yang memiliki kemampuan untuk merencanakan usahanya sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya, mampu memecahkan masalah dan mengetahui teknologi yang dibutuhkannya. Yang merupakan Jurus 1 dalam peningkatan kelas Kelompok. Secara skematis strategi peningkatan SDM ini dapat digambarkan sebagai berikut :



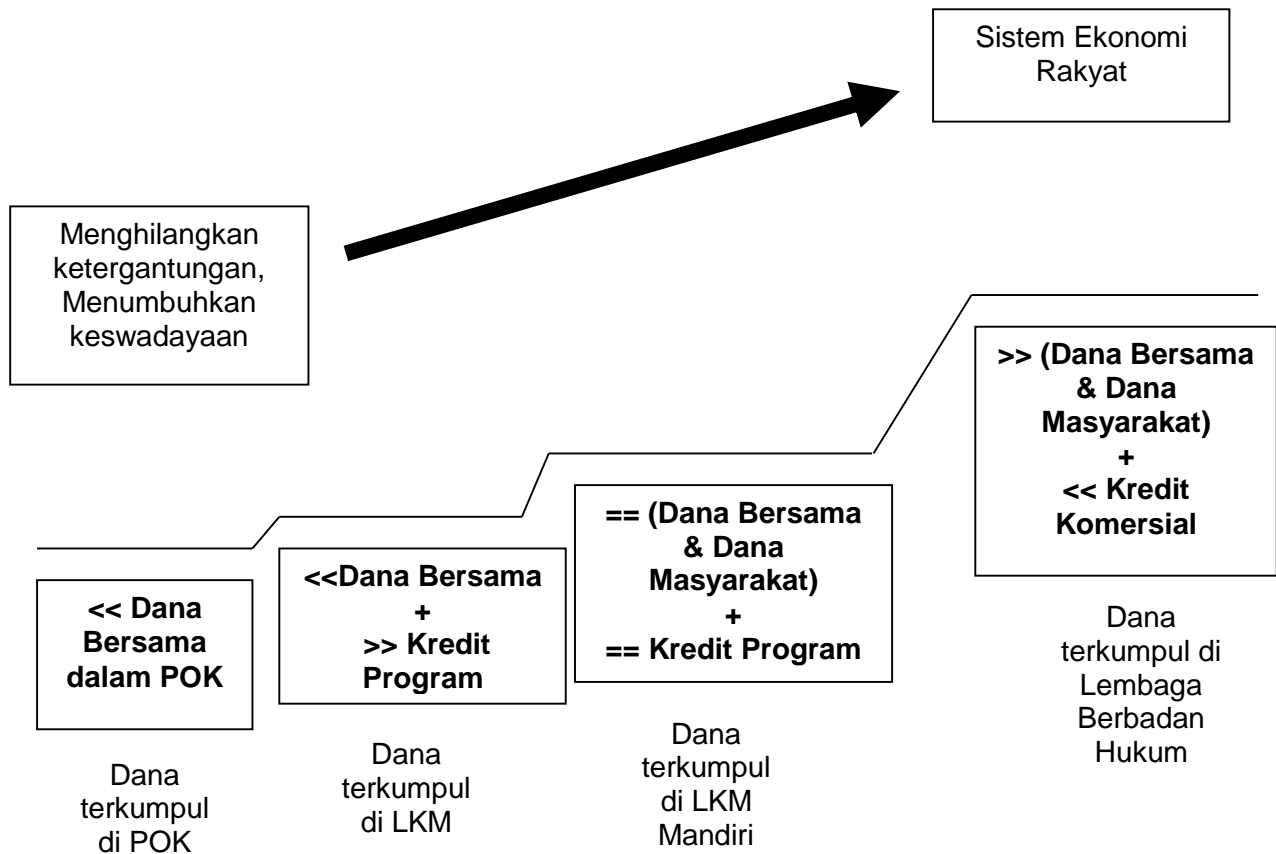
2) **Pengembangan modal** : Pengembangan permodalan dimulai dari kesadaran kelompok untuk memiliki dana bersama yang dikumpulkan dalam kelompok. Keberlanjutan penggalangan dana ini akan menghasilkan akumulasi

dana yang memerlukan satu wadah lembaga keuangan mikro yang dikelola secara kelompok yang akan menumbuhkan system ekonomi rakyat yang mampu memfasilitasi aspek permodalan anggotanya. Untuk memenuhi kekurangan dana sudah barang tentu kelompok akan bekerja



sama dengan lembaga lain (KUD misalnya) yang bersedia memberikan modal dengan biaya yang rendah. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kelompok dalam Jurusan 2, 3 dan 4 dalam peningkatan Kelas Kelompok.

Secara skematis strategi pengembangan permodalan ini dapat digambarkan sebagai mana skema berikut ini.

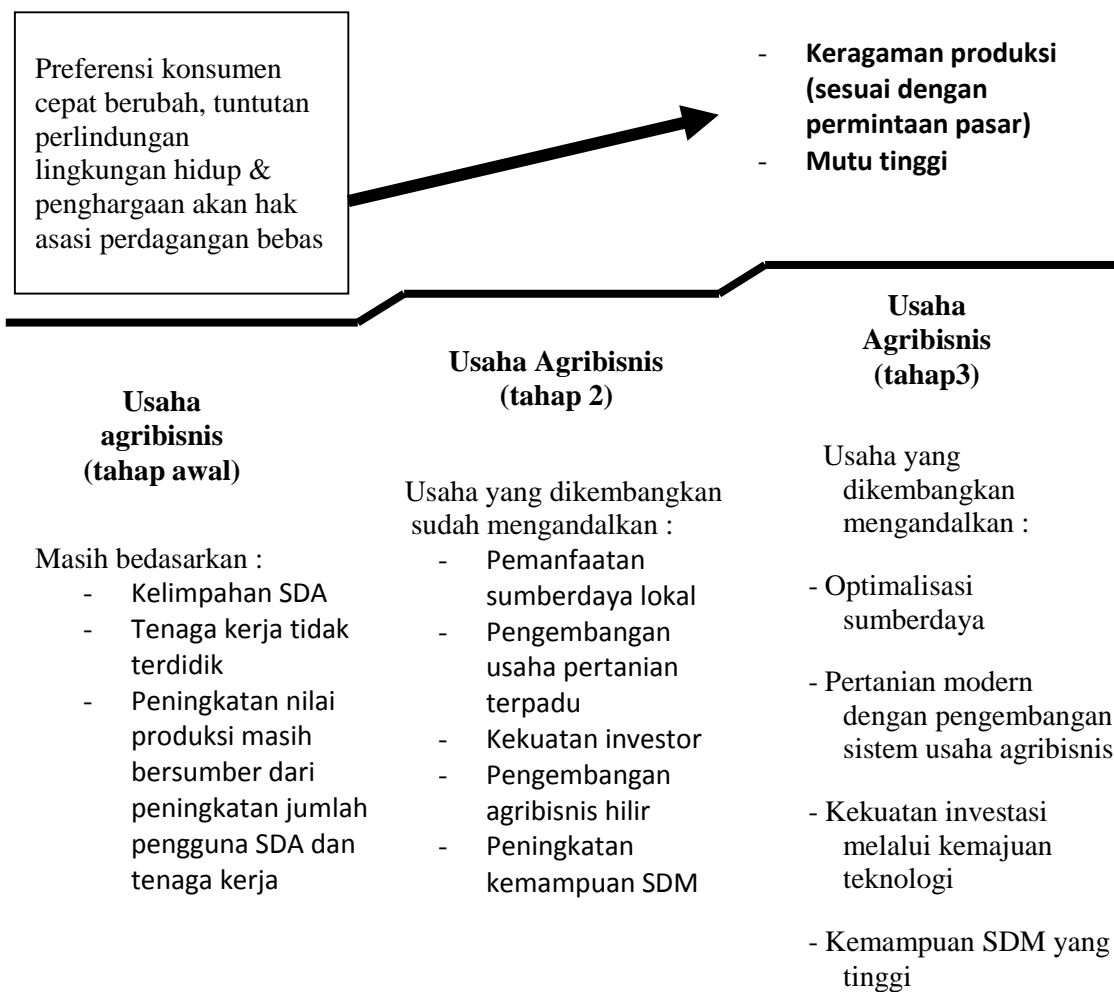




3) **Pengembangan usaha** : diawali dengan memanfaatkan kelimpahan SDA yang ada di wilayahnya. Selanjutnya petani diarahkan untuk berinisiatif memanfaatkan

sumberdaya lokal dengan memanfaatkan teknologi yang ada. (Jurus 5 dalam kelas kemampuan kelompok).

Secara skematis dapat digambarkan sebagaimana skema berikut ini.



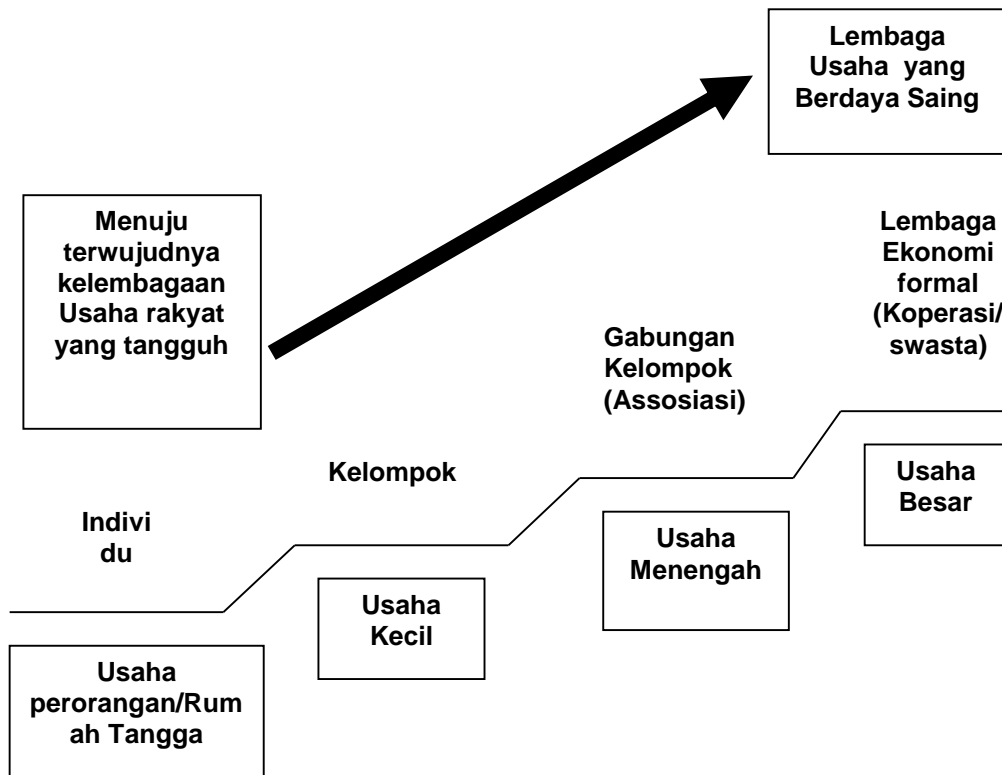


4) **Pengembangan Kelembagaan**

Usaha : di tahap awal keberadaan usaha masing-masing anggota dianggap sebagai unit produksi secara keseluruhan, selanjutnya untuk efisiensi usaha secara perlahan anggota kelompok satu dengan lainnya memulai usaha bersama secara kecil-

kecilan seperti pemasaran bersama, pengadaan sara produksi bersama. Pada gilirannya usaha kecil tersebut akan berkembang menjadi usaha menengah bahkan usaha besar yang memiliki badan hukum yang formal, (Jurus 5 dalam kelas kemampuan kelompok).

Secara skematis pengembangan kelembagaan usaha dapat digambarkan sebagaimana skema berikut ini :





Eko Legowo, 2006, mengemukakan bahwa Keberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani, sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif, maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih mensejahterakan.

Ada tiga strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang dapat diterapkan agar mereka mampu keluar dari lingkaran setan kemiskinan yang membelit yaitu : pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kemampuan dalam teknologi dan permodalan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat (Dudung Abdul Adjid, 2001).

Menurut Hermanto dan Swastika, Dewa K.S, 2011 ada 3 langkah operasional dalam menerapkan strategi penguatan kelompok yaitu

- 1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok

- 2) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui ; peningkatan fasilitasi dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi usahatani.
- 3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggotanya.

VI. PENUTUP

Peningkatan kelas kelompok merupakan alat untuk mengukur keberhasilan penyuluh dalam melakukan pemberdayaan petani dalam kelompoknya. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu peningkatan Kelas Kelompok haruslah sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan petani dalam kelompok tani bergantung pada kemampuan Lembaga penyuluhan dalam



meningkatkan kompetensi penyuluh, memberikan motivasi dan memfasilitasi biaya operasionalnya.

Ada lima jurus yang perlu dikuasai oleh kelompok tani dalam upaya meningkatkan kelas kemampuan kelompoknya yaitu

- 1) Kemampuan dalam perencanaan,
- 2) Kemampuan mengorganisasikan,
- 3) Kemampuan dalam melaksanakan
- 4) Kemampuan dalam melakukan pengendalian dan pelaporan
- 5) Kemampuan dalam mengembangkan kepemimpinan kelompok tani

Untuk itu strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dilakukan melalui :

1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Pertanian yang dilakukan melalui :
 - 1) Peningkatan Kompetensi Penyuluh melalui pelatihan.

- 2) Perbaiki internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervise dan monitoring

- 3) Fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk operasional penyuluhan

2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui program pemberdayaan yaitu

- 1) Pengembangan SDM
- 2) Pengembangan Modal
- 3) Pengembangan Usaha
- 4) Pengembangan Kelembagaan Usaha



DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008, Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya
- _____, 2007, Peraturan Menteri Pertanian, Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tanggal 13 April 2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
- _____, 2011, Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Nomor 168/Per/SM.170/J/11/11 Tanggal 18 November 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani.
- _____, 2013. Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tanggal 19 Agustus 2013
- _____, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Pusat Penyuluhan Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kementerian Pertanian.
- _____, Strategi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, IPB, Bogor. (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/52425/BAB%20V%20Strategi%20Penyelenggaraan%20Penyuluh%20Pertanian.pdf?sequence=9>)
- Adjid, Dudung Abdul, 2001, Membangun Pertanian Modern, Yayasan Pengembangan Sinar Tani, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, 1992, Teknik Bina Dinamika Kelompok Tani, Materi Latihan Bagi Pelatih, Jakarta



- Hermanto dan Swastika, Dewa K.S, 2011, Penguatan Kelompok Tani : Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor (<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART9-4e.pdf>)
- Legowo, Eko, 2006, Kepedulian Dhamma Terhadap Revitalisasi Pertanian, dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Kampar, 2011, Standar Operasional dan Prosedur Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK).
- Syahyuti, 2012, Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani; Analisis Kritis terhadap Permentan 237 Tahun 2007, diterbitkan dalam majalah Analisis Kebijakan Pertanian Vo. 10 No. 2 Tahun 2012 (<http://websyahyuti.blogspot.com/2012/07/analisis-kritis-terhadap-permentan-273.html>)
- Usman, Sunyoto, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.